



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petam Telp. 0966 – 31076



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 420 / 098 / DISPEMBUD / 2025

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD YPPK St. YOHANES XXIII SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SARMI

- Menimbang :
- a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi .
 - b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 - 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
 - 3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 - 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4245);
 - 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara SD YPPK St. Yohanes XXIII Sarmi
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 15 Juli 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sarmi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi ;
5. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 420 / 097 / DISPEMBUD / 2025
Tentang : Ijin Operasional SD YPPK St. Yohanes XXIII Sarmi

NO	Nama	ALAMAT	PENGELOLA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1	SD YPPK St. Yohanes XXIII Sarmi	Jalan Inpres Mararena - Sarmi	Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik	Sarmi	Sarmi

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 15 Juli 2025





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000922.AH.01.05.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK FRANSISKUS ASISI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANTONIUS EDDY KRISTIAN S.H., sesuai Akta Nomor 6, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris ANTONIUS EDDY KRISTIAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK FRANSISKUS ASISI tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023072091240062 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK FRANSISKUS ASISI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3
Kegiatan :
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK FRANSISKUS ASISI
NPWP : 02.646.539.3-95
berkedudukan di KOTA JAYAPURA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 6, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris ANTONIUS EDDY KRISTIAN S.H. yang berkedudukan di KOTA JAYAPURA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016139.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Juli 2023

